

SIARAN PERS

Audit HAM Sektor Nikel: Akselerasi Penguatan Tata Kelola HAM dalam Hilirisasi Nikel di Maluku Utara

SETARA Institute for Democracy and Peace
 Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI)
 Jakarta, 14 Agustus 2026

SETARA Institute for Democracy and Peace dan Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) menyelesaikan Audit Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap lima perusahaan yang memiliki posisi strategis dalam ekosistem industri nikel di Maluku Utara, dengan penelitian berjudul “Audit HAM pada Perusahaan Sektor Nikel di Maluku Utara: Membangun Fondasi Pertambangan yang Bertanggung Jawab (*Responsible Mining*)”. Audit dilakukan untuk menilai sejauh mana percepatan pertambangan dan hilirisasi nikel telah disertai penguatan tata kelola perusahaan, penghormatan terhadap HAM, perlindungan pekerja dan masyarakat, serta pengelolaan dampak lingkungan yang bertanggung jawab.

Lima perusahaan yang dinilai adalah PT Aneka Tambang Tbk. (ANTAM), PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (TBP/Harita Nickel), PT Wanatiara Persada, dan PT Weda Bay Nickel (WBN). Pemilihan perusahaan didasarkan pada posisi dalam rantai nilai nikel, skala operasi, signifikansi strategis, variasi model bisnis, dan risiko HAM maupun lingkungan.

Hasil audit menunjukkan bahwa perkembangan industri nikel di Maluku Utara bertumbuh secara eksponensial dibandingkan konsolidasi tata kelola sosial, lingkungan, dan HAM. Berbagai perusahaan telah membangun kebijakan, struktur ESG, sistem keselamatan, pengelolaan lingkungan, mekanisme pengaduan, program masyarakat, maupun inisiatif verifikasi independen. Namun, efektivitas berbagai sistem tersebut masih menghadapi kesenjangan pada aspek implementasi, transparansi, pelacakan dampak dan risiko, akuntabilitas lintas entitas, dan pemulihan terhadap pihak terdampak (*affected communities*).

Konsolidasi Skor dan Tingkat Kematangan

Perusahaan	RBC-N	RMA	Normatif (RBC-N x 60%) + (RMA x 40%)	RBC-A	Citra Satelit	Aktual (RBC-A x 60%) + (Citra x 40%)	Skor Komposit (Skor Normatif x 40%) + (Skor Aktual x 60%)	Level
TBP/Harita	78	78	78,0	50	60	54	63,60	Established
ANTAM	71	70	70,6	60	35	50	58,24	Improving
WBN	50	66	56,4	30	35	32	41,76	Improving

IWIP	58	65	60,8	30	25	28	41,12	Improving
Wanatiara	27	49	35,8	50	35	44	40,72	Basic

TBP/Harita Nickel memperoleh skor komposit 63,60 dan berada pada tingkat Established. ANTAM memperoleh skor 58,24; WBN 41,76; dan IWIP 41,12, ketiganya berada pada tingkat Improving. Wanatiara Persada memperoleh skor 40,72, yaitu berada pada tingkat Basic dikarenakan skor normative perusahaan masih berada di bawah ambang minimum yang ditetapkan dalam metodologi penilaian (< 40).

Hilirisasi Membawa Manfaat Ekonomi, tetapi Juga Memperluas Spektrum Risiko

Maluku Utara merupakan salah satu episentrum utama industri nikel Indonesia. Kegiatan pertambangan terkonsentrasi terutama di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan, termasuk Pulau Obi. Perkembangan tersebut berjalan beriringan dengan pembangunan smelter *Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF), fasilitas *High-Pressure Acid Leach* (HPAL), pembangkit listrik, pelabuhan, jalan angkut, kawasan industri, serta berbagai infrastruktur pendukung.

Ekspansi industri telah menghasilkan manfaat ekonomi melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa, peningkatan kapasitas manufaktur, serta penerimaan negara dan daerah. Namun, skala transformasi tersebut juga meningkatkan interaksi antara aktivitas industri dengan kawasan hutan, wilayah pesisir, permukiman, tanah dan sumber kehidupan masyarakat, kondisi pekerja, serta ruang hidup masyarakat adat.

Karena itu, keberhasilan hilirisasi tidak dapat hanya diukur dari nilai investasi, kapasitas produksi, jumlah smelter, volume ekspor, ataupun pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan juga harus ditentukan oleh kemampuan industri memastikan keselamatan pekerja, menjaga kualitas lingkungan, menghormati hak masyarakat, mencegah dampak negatif, serta menyediakan pemulihan yang efektif ketika kerugian terjadi.

Audit Menggabungkan Kapasitas Tata Kelola dan Kondisi Aktual

Audit menggunakan pendekatan *Human Rights Due Diligence Assessment* (HRDDA) dengan mengintegrasikan *Responsible Business Conduct* (RBC) *Benchmark* untuk **menilai komitmen HAM, struktur dan tata kelola, Human Right Due Diligence (HRDD), serta mekanisme pengaduan dan pemulihan**, serta *Responsible Mining Assessment* (RMA) untuk menilai lima dimensi pertambangan yang bertanggung jawab, meliputi *Business Conduct, Community Wellbeing, Working Conditions, Environmental Responsibility, dan Mine-site Indicators*.

Proses penelitian berlangsung selama enam bulan pada Februari - Juli 2026. Pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui asesmen dokumen, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, observasi lapangan, informasi regulator, dokumen perusahaan, laporan independen, serta informasi publik. *Qualitative Fact Checking* melalui pemantauan media dan laporan dilakukan untuk periode Januari 2023 - Juli 2026, sementara analisis spasial dan citra satelit digunakan untuk melihat dinamika lingkungan pada periode 2016 - 2026.

Penilaian membedakan Variabel Normatif dan Variabel Aktual. Skor Normatif dihitung dari RBC Normatif dengan bobot internal 60% dan RMA sebesar 40%. Skor Aktual dibentuk dari RBC Aktual dengan bobot internal 60% dan analisis citra sebesar 40%. Skor Komposit akhir kemudian dihitung dengan memberikan bobot 40% kepada Skor Normatif dan 60% kepada Skor Aktual. Bobot yang lebih besar terhadap kondisi aktual dimaksudkan untuk memastikan bahwa kelengkapan kebijakan tidak mengalahkan bukti mengenai dampak, efektivitas tindakan, dan pemulihan.

TBP/Harita Nickel: Established, tetapi Keberlanjutan HRDD dan Rencana Tindakan Korektif Masih Perlu Diperkuat

TBP/Harita Nickel memperoleh hasil tertinggi dengan Skor Komposit 63,60 dan berada pada tingkat Established. Perusahaan menunjukkan fondasi korporat dan operasional yang relatif lengkap melalui kebijakan HAM, etika dan antikorupsi, struktur tata kelola, kebijakan keberlanjutan, responsible sourcing, HRDD, mekanisme pengaduan, serta berbagai sistem keselamatan dan lingkungan.

Pada tingkat operasional, perusahaan menunjukkan pengelolaan reklamasi, sediment pond, pengelolaan tailing, fasilitas *Dry Stack Tailing Facility* (DSTF), pemantauan emisi melalui *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS), fasilitas pembibitan, konservasi, rehabilitasi pesisir, ekonomi sirkular, dan sejumlah inisiatif dekarbonisasi. TBP juga telah memasuki proses penilaian independen IRMA yang melibatkan audit dokumen, audit lapangan, keterlibatan pekerja dan masyarakat, serta proses tindakan korektif.

Namun, tingkat Established tidak berarti seluruh risiko telah terselesaikan. Audit masih mengidentifikasi kebutuhan penguatan pada pelaksanaan HRDD secara berkala, kebebasan berserikat, FPIC, pengadaan tanah, dinamika relokasi Kawasi, pembangunan bandara di Soligi, kepastian hak di Ecovillage, serta verifikasi atas efektivitas pemulihan.

ANTAM: Fondasi Korporat Kuat, tetapi Data Tingkat Lokasi dan Integrasi Antar-Entitas Masih Terbatas

ANTAM memperoleh Skor Komposit 58,24 dan berada pada tingkat Improving. Sebagai BUMN sekaligus perusahaan terbuka, ANTAM memiliki fondasi tata kelola yang relatif mapan melalui sistem etika, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, OpenMIND, struktur tata kelola, pemetaan risiko, PRISMA, kebijakan HAM, Perjanjian Kerja Bersama, sistem K3, kebijakan lingkungan, dan mekanisme pengadaan.

Tantangan utama berada pada penerjemahan sistem korporat tersebut ke tingkat operasional Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Maluku Utara, khususnya di site Moronopo, Tanjung Buli, Pulau Pakal, PT Nusa Karya Arindo, PT Sumberdaya Arindo, serta PT Feni Haltim. Penguatan menuju tingkat berikutnya membutuhkan data tingkat lokasi yang lebih transparan, pelacakan efektivitas tindakan, integrasi pengelolaan risiko lintas entitas, dan pemulihan yang dapat diverifikasi.

IWIP: Kompleksitas Kawasan Menuntut Akuntabilitas Lintas Tenant

IWIP memperoleh Skor Komposit 41,12 dan berada pada tingkat Improving. Sebagai pengelola kawasan industri terpadu dengan 21 fasilitas pengolahan RKEF dan pemurnian HPAL, IWIP menghadapi karakter risiko yang berbeda dibandingkan perusahaan pertambangan tunggal.

Perusahaan telah membangun struktur ESG, sistem integritas, pengelolaan pemasok, HRIA, SPARING, CEMS, pelatihan keselamatan, dan berbagai program masyarakat. Namun, skala kawasan dan banyaknya badan hukum yang beroperasi menciptakan persoalan fragmentasi akuntabilitas antara pengelola kawasan, tenant, kontraktor, subkontraktor, perusahaan tambang pemasok, pembangkit listrik, dan penyedia jasa. Kondisi tersebut membutuhkan sistem tata kelola kawasan yang mampu mengintegrasikan data, menetapkan standar minimum bagi seluruh tenant dan kontraktor, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan pemulihan lintas entitas.

WBN: Pengelolaan Masyarakat Adat, Hutan, dan Transisi Tenaga Kerja Menjadi Isu Material

WBN memperoleh Skor Komposit 41,76 dan berada pada tingkat Improving. Perusahaan telah mengembangkan sejumlah fondasi, antara lain komitmen mengikuti IRMA, studi etnologi, kajian mata pencaharian, uji tuntas pengadaan tanah (*Land Acquisition Due Diligence*), sertifikasi ISO 14001 dan ISO 45001, reklamasi, rehabilitasi daerah aliran sungai, pengelolaan air, serta sistem keselamatan.

Tantangan penting masih terdapat pada adopsi kebijakan HAM di tingkat entitas, akuntabilitas perusahaan patungan, keterbukaan mekanisme pengaduan, pengadaan tanah, *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), perlindungan masyarakat adat O'Hongana Manyawa, fragmentasi kawasan hutan, serta transparansi data pekerja dan kontraktor. Perubahan kuota produksi pada 2026 juga menunjukkan perlunya HRDD yang mencakup konsultasi dengan serikat pekerja, perlindungan pekerja kontraktor, perencanaan transisi tenaga kerja, dan mitigasi dampak ekonomi akibat perubahan produksi.

Wanatiara Persada: Penguatan Fondasi Kebijakan HAM Menjadi Prioritas

Wanatiara Persada memperoleh Skor Komposit 40,72, tetapi ditempatkan pada kategori Basic karena Skor Normatif perusahaan berada di bawah ambang minimum penilaian.

Perusahaan telah memiliki berbagai prosedur operasional, termasuk pengelolaan kontrak, keselamatan produksi, pengawasan lingkungan, reklamasi, serta program pendidikan, kesehatan, dan dukungan ekonomi lokal. Namun, audit menemukan bahwa fondasi kebijakan HAM, struktur akuntabilitas, HRDD, mekanisme pengaduan eksternal, kebijakan terkait masyarakat adat dan FPIC, kebebasan berserikat, serta keterbukaan data K3 dan lingkungan masih memerlukan penguatan signifikan.

Ringkasan Temuan dan Prioritas Penguatan

Perusahaan	Fondasi/Kekuatan Utama	Prioritas Penguatan
------------	------------------------	---------------------

Perusahaan	Fondasi/Kekuatan Utama	Prioritas Penguatan
TBP/Harita	Kebijakan HAM; tata kelola dan responsible sourcing; HRDD; mekanisme pengaduan; sistem K3 dan pengelolaan lingkungan; keterbukaan terhadap audit IRMA.	Pengulangan HRDD; kebebasan berserikat; pekerja kontraktor; FPIC; pengadaan tanah dan relokasi; verifikasi pemulihan.
ANTAM	Tata kelola BUMN dan perusahaan terbuka; etika dan anti-penyuapan; OpenMIND; PRISMA; PKB; K3 dan kebijakan lingkungan.	Data site-specific; integrasi lintas entitas; pekerja kontraktor; pelacakan efektivitas; assurance independen dan bukti pemulihan.
IWIP	Struktur ESG; HRIA; integritas; pengelolaan pemasok; SPARING dan CEMS; program masyarakat.	Akuntabilitas lintas tenant; mekanisme pengaduan kawasan; data lingkungan dan pekerja terintegrasi; pengawasan kontraktor dan pemasok.
WBN	Komitmen IRMA; studi etnologi; Land Acquisition Due Diligence; ISO 14001/45001; reklamasi dan pengelolaan air.	Kebijakan tingkat entitas; Masyarakat adat O'Hongana Manyawa dan FPIC; pengadaan tanah; data pekerja/kontraktor; transisi tenaga kerja dan pemulihan.
Wanatiara	Prosedur keselamatan dan kontrak; pengawasan lingkungan; reklamasi; program sosial.	Kebijakan HAM; HRDD; akuntabilitas dewan; mekanisme pengaduan eksternal; kebebasan berserikat; data K3/lingkungan dan pemulihan.

Pemulihan Menjadi Mata Rantai Terlemah

Audit menemukan bahwa pemulihan merupakan salah satu komponen paling lemah dalam tata kelola HAM. Sejumlah perusahaan telah menyediakan kanal pengaduan, tetapi informasi mengenai proses penyelesaian, kepuasan pengguna, bentuk pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan masih terbatas. Respons berupa pertemuan, klarifikasi, bantuan sosial, penyediaan air, layanan kesehatan, maupun perbaikan fasilitas dapat menjadi langkah awal, tetapi pemulihan harus dinilai berdasarkan kerugian yang dialami pemegang hak.

HRDD Harus Berubah dari Kegiatan Episodik Menjadi Sistem Pengambilan Keputusan

Audit menemukan bahwa HRDD pada sejumlah perusahaan masih cenderung dilaksanakan sebagai kegiatan atau asesmen tertentu dan belum sepenuhnya menjadi siklus manajemen yang terus diperbarui. Temuan risiko harus dapat memengaruhi desain proyek, anggaran, kontrak,

pemilihan pemasok, target manajemen, perluasan tambang, pembangunan fasilitas, pengadaan tanah, relokasi, hingga keputusan untuk mengubah atau menghentikan kegiatan ketika terdapat risiko yang berat.

Dampak Lingkungan Harus Dinilai Secara Kumulatif

Pertumbuhan kawasan industri terintegrasi memerlukan perubahan cara menilai dampak lingkungan. Tambang, jalan angkut, stockpile, smelter, PLTU, pelabuhan, permukiman pekerja, serta lalu lintas kapal menghasilkan tekanan yang saling berinteraksi terhadap daerah aliran sungai, pesisir, udara, biodiversitas, penghidupan, dan kesehatan masyarakat. Karena itu, diperlukan kajian dampak kumulatif untuk Weda Bay dan Pulau Obi yang menghubungkan kondisi lingkungan dengan data kesehatan, penghidupan, keluhan masyarakat, pola musim, arah angin, dan perubahan aktivitas produksi.

Tata Kelola HAM Menjadi Bagian dari Daya Saing Nikel Indonesia

Perkembangan standar global menunjukkan bahwa penghormatan terhadap HAM dan lingkungan telah menjadi bagian dari daya saing mineral kritis. Investor, lembaga pembiayaan, produsen baterai, industri kendaraan listrik, dan pembeli global semakin menuntut keterlacakan mineral, HRDD, pengurangan emisi, keselamatan kerja, perlindungan masyarakat adat, pengadaan bertanggung jawab, dan akses terhadap pemulihan. Penguatan Responsible Mining karena itu merupakan fondasi agar industri nikel Indonesia dapat mempertahankan legitimasi dan daya saing dalam rantai pasok transisi energi global.

Tiga Tahap Prioritas Perbaikan

SETARA Institute mendorong agenda perbaikan secara bertahap dan terukur agar penguatan tata kelola dapat diterjemahkan ke dalam keluaran yang dapat diverifikasi.

Jangka Waktu	Prioritas Utama	Keluaran Terukur
0 - 6 bulan	Verifikasi independen dampak berat; buka dan rekonsiliasi register insiden/pengaduan; sinkronkan data regulator dan pemerintah daerah; tetapkan tindakan perlindungan sementara.	Daftar kasus tervalidasi, penanggung jawab, tenggat, dan tindakan pencegahan segera.
6 - 18 bulan	Laksanakan HRDD per site dan lintas entitas; perbaiki mekanisme keluhan; lakukan remediasi tanah, lingkungan, kesehatan, dan hak pekerja; lakukan kajian dampak kumulatif Weda Bay dan Pulau Obi.	Rencana aksi, data tingkat lokasi, kesepakatan pemulihan, dan dashboard publik.

Jangka Waktu	Prioritas Utama	Keluaran Terukur
18 - 36 bulan	Integrasikan HAM ke KPI; susun transisi energi dan rencana penutupan; audit efektivitas pemulihan; evaluasi daya dukung dan standar kawasan industri.	Penurunan insiden, pemulihan terukur, peningkatan kepercayaan, dan pembaruan tingkat kematangan.

Penegasan Akhir

Penguatan tata kelola memerlukan pembagian peran yang jelas. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM dan menerapkan HRDD pada seluruh operasi serta hubungan bisnis yang relevan. Pengelola kawasan perlu menetapkan standar bersama bagi tenant dan kontraktor. Perusahaan induk dan pemegang saham harus menggunakan pengaruhnya terhadap perusahaan patungan dan anak usaha. Kontraktor dan pemasok juga harus tunduk pada standar HAM dan lingkungan yang sebanding dengan risiko yang mereka kelola.

Pada saat yang sama, negara tetap memegang kewajiban utama untuk melindungi HAM melalui perizinan yang akuntabel, pengawasan lapangan, penegakan hukum, keterbukaan informasi, perlindungan terhadap pembela HAM, penyelesaian konflik tanah, pengawasan ketenagakerjaan, dan akses terhadap pemulihan yudisial maupun nonyudisial.

SETARA Institute menegaskan bahwa keunggulan industri nikel Indonesia tidak cukup dibangun melalui peningkatan produksi dan kapasitas pengolahan. Keunggulan tersebut harus berjalan seiring dengan transparansi, akuntabilitas, keselamatan pekerja, perlindungan masyarakat, kualitas lingkungan, partisipasi pemegang hak, dan pemulihan yang efektif.

Keberhasilan hilirisasi pada akhirnya harus tercermin pada kondisi konkret: pekerja dapat bekerja dan pulang dengan selamat; masyarakat tetap memperoleh akses yang layak terhadap tanah, air, dan sumber penghidupan; masyarakat adat memperoleh penghormatan atas hak dan ruang hidupnya; kualitas lingkungan dapat dipertahankan atau dipulihkan; serta setiap pihak yang mengalami dampak memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian dan pemulihan yang efektif. Dengan fondasi tersebut, nikel Indonesia dapat berkontribusi pada transisi energi global yang tidak hanya rendah karbon, tetapi juga adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Direktur Eksekutif SETARA Institute:

Halili Hasan

Telp. (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683

Hotline: +62851 00255 123

setara@setara-institute.org

setara_institute@hotmail.com